

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para TKI, khususnya TKI yang bekerja di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.¹⁾

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di satu sisi dapat membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia. TKI banyak memberikan devisa bagi negara. Namun demikian melihat peraturan yang ada selama ini, para TKI ini kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum. Banyak masalah yang dihadapinya, mulai dari penipuan pada waktu perekrutan, pengekangan di tempat penampungan, pemalsuan identitas, mengalami kekerasan sampai tewas di tempat kerja. Hal ini terjadi terus menerus seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikannya. Undang-undang yang baru beserta peraturan pelaksanaannya yang dipakai selama ini juga kurang memberikan perlindungan kepada calon/TKI.²⁾

¹⁾ Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 99.

²⁾ Ibid, hal 1.

Silih berganti kejadian dan peristiwa telah diberitakan di media televisi dan majalah, mulai dari penganiayaan TKI, pemulangan, pelecehan seksual, bahkan sampai pada hukuman penjara atas TKI seperti yang terjadi di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Negara lainnya. Melihat kasus-kasus yang telah terjadi, maka dapat dianalisa secara perlahan-lahan mengenai permasalahan TKI ini. Hal ini seperti yang terlihat dalam data berikut:

TABEL I
TINDAK KEKERASAN TERHADAP TKI DAN TKW

No	Negara	Tahun	Jumlah Kasus
1.	Malaysia	2008	36 Kasus
2.	Arab Saudi	2008	18 Kasus
3.	Singapura	2007	12 Kasus
4.	Yordania	2009	7 Kasus
5.	Hongkong	2010	5 Kasus
6.	Taiwan	2008	9 Kasus
7.	Kuwait	2008	3 Kasus
8.	Jepang	2009	3 Kasus

Sumber: www.mediaIndonesia.com/berita.asp?id=141138-67k-

Malaysia merupakan salah satu negara sasaran utama pengiriman tenaga kerja. Hal ini ditinjau dari segi letak geografis, tata bahasa maupun budaya yang hampir sama dengan Indonesia, sehingga tidak ada kendala dalam hal bahasa. Keberadaan TKW Indonesia di Malaysia yang selama ini sering mengalami dilema, seperti dilecehkan oleh beberapa tindakan kekerasan oleh sebagian

majikan, nampaknya masih menjadi masalah yang belum tertuntaskan sampai saat ini. Tindak kekerasan yang masih kerap dialami oleh TKI khususnya pada TKW inilah yang menunjukkan bahwa pada hakekatnya diskriminasi gender masih kerap terjadi, perempuan dianggap sebagai kaum lemah yang tingkatannya berada dibawah kaum laki-laki. Hal ini seperti yang tercantum dalam data berikut ini.

TABEL II

**DATA TKW INDONESIA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN
DI MALAYSIA SELAMA JANUARI-MEI 2010**

No	Jenis Tindak Kekerasan	Jumlah Korban
1.	Pelacuran	91 orang
2.	Penelantaran	52 orang
3.	Penipuan	19 orang
4.	Pengusiran oleh majikan	7 orang
5.	Penyiksaan oleh majikan	5 orang
6.	Stress/sakit	6 orang
7.	Pemeriksaan oleh majikan	8 orang
8.	Meninggal dunia	1 orang

Sumber: Kompas, juni 2010

Beberapa masalah dibidang ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia dewasa ini masih cukup berat, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, baik ditinjau dari segi pendidikannya maupun segi keahlian dan keterampilannya.
2. Terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan, karena lulusan pendidikan formal belum siap pakai untuk bekerja di tengah-tengah masyarakat.

3. Disatu pihak jumlah angkatan kerja setiap tahunnya semakin bertambah, sedang di lain pihak dirasakan kekurangan modal guna menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.³⁾

Lebih lanjut SendjunH. Manullang menyebutkan bahwa: Ada 3 (tiga) unsur atau faktor yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu:

1. Adanya pekerjaan yang harus dilakukan;
2. Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan/pengusaha) dan;
3. Adanya upah.⁴⁾

Dalam hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan, maka ada ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia. Ketidak seimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencari keuntungan diri pribadi, yaitu dengan melakukan penipuan terhadap para calon tenaga kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dengan syarat mudah tanpa persyaratan bekal ketrampilan, terlebih diberikan janji-janji untuk dapat disalurkan untuk bekerja di luar negeri seperti misalnya dijadikan anak buah kapal (ABK) untuk kapal penangkap ikan atau akan disalurkan bekerja di kapal pesiar maupun pabrik-pabrik yang ada di luar negeri. Padahal orang tersebut tidak mempunyai izin untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri atau tidak mempunyai jaringan lowongan pekerjaan di negara asing.

Situasi dan kondisi demikian tentu tidak disia-siakan individu tersebut untuk melakukan kejahatan, karena jalan pintas yang ditempuh pencari kerja merupakan peluang dan kesempatan emas. Korban penipuan calon tenaga kerja khususnya bagi para calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja di

³⁾ Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, hal. 53.

⁴⁾ Ibid., hal. 64.

luar negeri ternyata tidak pandang bulu, mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar sampai sarjana. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan bukan salah satu usaha atau penangkal untuk mengatasi penipuan calon tenaga kerja.

Penipuan merupakan salah satu dari perbuatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang selalu muncul dalam hukum pidana, sehingga dapat dikatakan sebagai pengertian dasar dan menjadi persoalan pokok, karena bila tidak ada tindak pidana, maka tidak akan ada pidana.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEBAGAI TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”

B. Pembatasan Masalah

Guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut kepada calon tenaga kerja Indonesia, maka penulis membatasi permasalahan agar penulis dapat memfokuskan diri pada setiap pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Karakteristik normatif dan bentuk-bentuk dari tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dasar pertimbangan apakah yang dipakai hakim dalam mengadili terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan kepada calon tenaga kerja Indonesia di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik normatif dari tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Indonesia?
2. Apakah yang menjadi alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana penipuan calon Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari aspek normatif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji karakteristik normatif dari tindak pidana penipuan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Mengkaji alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pada tindak pidana penipuan calon Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari aspek normatif.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Guna menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis, khususnya tentang masalah tindak pidana penipuan calon tenaga kerja Indonesia.

- b. Bagi masyarakat khususnya calon tenaga kerja atau pencari kerja, supaya dapat lebih meningkatkan kewaspadaannya terhadap oknum-oknum yang akan menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan pekerjaan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbang saran guna penegakan hukum dalam hal masalah penipuan calon tenaga kerjaIndonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dikatakan yuridis karena dalam mengadakan pendekatan obyek yang diteliti prinsip-prinsip dan asas-asas hukumlah yang digunakan khususnya hukum pidana. Sedangkan dikatakan normatif karena masalah penipuan terhadap calon tenaga kerja Indonesia pada dasarnya menjadi masalah yang sudah masuk ke ranah pidana yang terjadi di wilayah hukum Surakarta, sehingga aspek hukumlah yang dipakai sebagai pendekatannya yaitu aspek yuridis normatif.

2. Jenis Penelitian

Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, “yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”⁵⁾.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan

⁵⁾ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 10.

menyeluruh mengenai proses pertimbangan apakah yang dipakai hakim dalam mengadili terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut kepada calon tenaga kerja Indonesia di Pengadilan Negeri Surakarta dan hambatan-hambatan dalam menanggulangi atau mengurangi penipuan kepada calon tenaga kerja Indonesia.

3. Jenis data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti
- 2) Makalah atau esai yang ada hubungannya dengan permasalahan tenaga kerja Indonesia

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

- Kamus hukum

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian dan penelaahan literatur yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam memaparkan teori-

teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang tertuang dalam buku-buku, karya-karya ilmiah, serta sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Metode Analisis

Pada uraian diatas telah dikemukakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, oleh karena itu untuk menghasilkan data deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode Deduktif Kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan fakta yang bersifat umum kemudian data dipelajari dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya diteliti dan dianalisa dengan cara membandingkannya dengan apa yang sebelumnya dipelajari dalam teori terhadap praktik yang kita temui di lapangan, sehingga dari penelitian tersebut dapat diharapkan muncul suatu gambaran yang jelas mengenai tindak pidana penipuan calon tenaga kerja dan penegakan hukumnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran dalam penulisan skripsi ini maka sistematika skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang tersusun rapi kedalam sub-sub bagian yang memuat pembahasan yang berbeda-beda guna mempermudah pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini dalam empat bab.

BAB I Merupakan pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum

BAB II Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan, Tugas dan Wewenang Hakim, Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, didalamnya dibahas mengenai inti dari penulisan skripsi yang berisikan tentang karakteristik normatif tindak pidana tenaga kerja indonesia, alasan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penipuan calon tenaga kerja indonesia ke luar Negeri melalui studi kasus di pengadilan negeri Surakarta. Di sini penulis melampirkan data penelitian dari pengadilan negeri Surakarta, yang kemudian menjadi dasar pembahasan.

BAB IV Adalah Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran, bagi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN